

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Istilah implementasi dikenal dalam birokrasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang bermaksud untuk mendistribusikan output atau realisasi program yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Kegiatan implementasi mencakup segala tindakan yang melibatkan berbagai aktor khususnya para birokrat, yang ditujukan untuk membuat program kebijakan dan merumuskan pemecahan masalah yang dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut permasalahan yang ada pada masyarakat.<sup>1</sup> Dibalik implementasi kebijakan terdapat berbagai pelaku atau aktor-aktor yang terlibat mulai dari *Policy makers*, *formal implementers* /*street level bureaucracy*, *lobbyists*, penerima atau sasaran kebijakan, *mass media*, *interested group* dan *evaluator*.

*Policy makers* dan *formal implementers* merupakan aktor atau para pelaku resmi dalam proses implementasi kebijakan yang bertugas merumuskan kebijakan. Implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka implementor garda depan yang disebut sebagai *street level bureaucracy* yakni sebagai pelaku resmi dalam implementasi kebijakan berkedudukan sebagai pihak yang harus melakukan persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku lain yang memiliki kepentingan di

---

<sup>1</sup>Erwan Agus Purwato, Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 21

luar formal implementer. *Street level bureaucracy* adalah birokrat tingkat bawah dari badan publik atau lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan anggota masyarakat umum. *Street level bureaucracy* bertindak sebagai implementator dari keputusan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pembuat kebijakan juga menjadi garda depan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang memiliki kepentingan dengan pemerintah.<sup>2</sup>

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan, terdapat dua bentuk tahap yang bisa dipakai, yaitu bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskan dan disahkannya suatu kebijakan maka secara otomatis kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, contohnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain. Yang kedua bersifat *non self-executing*, maksudnya suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan bisa tercapai.<sup>3</sup>

Secara teknis jika dilihat dari model kebijakan publik terdapat beberapa tingkatan kebijakan, diantaranya adalah kebijakan yang bersifat khusus, diberlakukan hanya untuk lingkup internal daerah tertentu contohnya yang berkaitan dengan peraturan daerah, dibuat oleh badan eksekutif dan legislatif daerah masing-masing. Kemudian kebijakan umum, yaitu kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, dan UU. Dalam kebijakan umum Presiden memiliki wewenang

<sup>2</sup> Eko Handoyo, 2012, *Kebijakan Publik*, Widya Karya, Semarang, hlm. 97-98

<sup>3</sup> M. Munawir, Alyas, Lukman Hakim, 2019, Implementasi Kebijakan Brigade Siaga Bencana Dalam Tanggap Darurat Di Kabupaten Bantaeng, *Journal of Public Policy and Management*, Vol 3, No. 1, hlm.

menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan nasional, kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden.<sup>4</sup>

Harus diakui bahwa dalam setiap proses kebijakan publik akan selalu ada kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan apa yang sebenarnya dicapai sebagai hasil atau kinerja implementasi kebijakan. Setiap kebijakan publik yang telah dipilih oleh pemerintah tentunya harus objektif supaya tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Faktanya berbagai kebijakan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika diimplementasikan ternyata pencapaiannya jauh dari apa yang diharapkan. Contohnya adalah berbagai program anti kemiskinan yang gagal diimplementasikan oleh pemerintah pada Orde Baru dan Era Reformasi, yakni mulai dari program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang digagas oleh pemerintahan Soeharto hingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan PNPM Mandiri yang digagas oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Penyebab kegagalan program-program anti kemiskinan tersebut selain kuatnya praktik Korupsi Kolusi dan Nepoisme (KKN), ada faktor lain seperti rendahnya pengetahuan kelompok sasaran kebijakan, lemahnya dukungan pemerintah daerah dan kecenderungan untuk penyeragaman kebijakan.<sup>5</sup>

Kegagalan implementasi dari kebijakan dan program pembangunan tersebut mengundang keprihatinan masyarakat atau publik secara luas karena berkaitan

---

<sup>4</sup> Sahya Anggara, 2014, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 41

<sup>5</sup> Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, *op. cit*, hlm. 2

dengan kerugian secara finansial sehingga terjadi *lost of opportunity* yang di latar belakang oleh keterbatasan anggaran. Implikasi kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan adalah berpengaruh pada ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan publik terutama untuk memerangi kemiskinan kedepannya.<sup>6</sup>

Berapa kasus di atas menunjukkan bahwa persoalan publik dapat menarik perhatian banyak pihak sehingga upaya untuk mengatasi persoalan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah namun juga melibatkan swasta dan masyarakat sipil. Seperti yang disimpulkan oleh Van Meter dan Van Horn implementasi kebijakan bermakna tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>7</sup>

Harus ditekankan bahwa dalam implementasi kebijakan publik baik program-program pemerintah pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan, yang masing-masing akan berusaha mempengaruhi perilaku birokrat garda depan (*street level bureaucrats*). Seperti yang ditekankan oleh pendekatan *bottom-up* yang mana ada dua aspek penting dalam implementasi suatu kebijakan, yaitu terletak pada *street level bureaucrat* dan *target group*. Hal ini terkait dengan posisinya yang bertugas menyampaikan keluaran kebijakan tersebut kepada kelompok sasaran. Dengan peran yang demikian, oleh karena itu *street level bureaucrat* menduduki posisi kunci

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>7</sup> Solichin Abdul Wahab, 2017, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 135

keberhasilan implementasi kebijakan jika sejak awal melibatkan target group dalam proses perencanaan kebijakan sampai proses implementasinya<sup>8</sup>

Implementasi sebagai proses besar memiliki resiko kegagalan dan berpengaruh pada efektifitas kebijakan. kebijakan pemerintah dewasa ini banyak yang berkaitan dengan program subsidi yakni berupa bantuan uang tunai, salah satunya Program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil<sup>9</sup>. Tujuan dibentuknya Program Kartu Prakerja ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Program Kartu Prakerja dibuka pertama kali pada 11 April 2020. Sampai saat ini sudah terlaksana 37 gelombang. Seiring perjalanannya banyak polemik yang menjadi perdebatan bahkan sebelum kebijakan tersebut disahkan. Diantaranya *pertama* Kartu Prakerja dinilai tidak tepat sasaran dan efektif karena masyarakat tidak membutuhkan pelatihan pada masa pandemi melainkan dana tunai untuk bertahan hidup, *kedua* kebijakan Kartu Prakerja terkesan tergesa-gesa dan tidak jelas sehingga menyebabkan kebijakan Kartu Prakerja kurang matang dan terlihat kurang persiapan, *ketiga* penyelenggaraan kerja sama dan proses pemilihan mitra digital platform dalam kebijakan Kartu Prakerja bermasalah, *keempat* konten pelatihan pada

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 130

<sup>9</sup> Prakerja.go.id (diakses pada tanggal 10 juni 2020 pukul 09.00 WIB)

kebijakan Kartu Prakerja dinilai tidak layak, yang mana menurut kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Sebagian besar konten-konten pelatihan yang disediakan dalam program Kartu Prakerja ini justru dapat ditemukan dan diakses secara gratis di internet.<sup>10</sup>

Implementor kebijakan dalam Program Kartu Prakerja adalah Komite Cipta Kerja yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Namun sesuai Peraturan Presiden No. 36 tahun 2020 pasal 28, Pemerintah daerah berperan memberikan dukungan dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk sosialisasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja, penyediaan data lembaga Pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah, penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah, dan fasilitasi pendaftaran peserta dari pemilihan jenis pelatihan pada Program Kartu Prakerja.<sup>11</sup>

Dalam acara sosialisasi kebijakan Program Kartu Prakerja (wilayah Jabar 1) di Bekasi, Jumat (04/09/2020) sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintahan Daerah diharapkan dapat ikut membantu menyosialisasikan Program Kartu Prakerja kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya di masing-masing daerah, memberikan fasilitas kepada masyarakat yang kesulitan infrastruktur, sarana digital, maupun penyandang disabilitas, supaya mereka dapat mendaftarkan maupun

<sup>10</sup> Widiastiani, 2021, Polemik Kartu Prakerja Sebagai Kebijakan Bidang Hukum Ketenagakerjaan Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol 5, No. 2, hml. 44-50

<sup>11</sup> Peraturan Presiden No 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 28

mengikuti pelatihan secara daring dan menyinergikan program Kartu Prakerja dengan program Pemda lainnya.<sup>12</sup> Dalam hal ini Pemerintah daerah melalui Disnakertrans juga memiliki peran dalam menyukseskan program Kartu Prakerja pada daerah masing-masing.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji isu yang serupa dengan implementasi kebijakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rozzaq (2021) tentang “Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya”<sup>13</sup>. Kemudian Mulyadi (2019) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung”<sup>14</sup>. Dan terakhir oleh Cecelia Hellenia Sasuwuk dkk (2021) tentang “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa”<sup>15</sup>.

Dapat dilihat beberapa penelitian di atas membahas isu yang sama yakni tentang implementasi kebijakan program subsidi pemerintah. Penelitian di atas berangkat dari fenomena yang sama yaitu kompleksitas dinamika yang terjadi dalam lingkup *street level bureaucrat*, terdapat miskomunikasi antar agen pelaksana, proses pendataan yang tidak transparan, dan alokasi dana yang tidak tepat. Kelebihan dari ketiga

<sup>12</sup> [Kominfo.go.id/content/detail/29136/sukseskan-kartu-prakerja-sinergi-pusat-dan-daerah-diperkuat/0/berita](https://kominfo.go.id/content/detail/29136/sukseskan-kartu-prakerja-sinergi-pusat-dan-daerah-diperkuat/0/berita) (diakses pada 27 Juli 2022 pukul 20:41 WIB)

<sup>13</sup> Rozzaq, 2021, Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, *Jurnal Publicuho*, Vol. 4, No. 2, hlm. 315

<sup>14</sup> Mulyadi, 2019, Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Bandung, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 16, No. 1, hlm. 66

<sup>15</sup> Cecelia Hellenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, Novie Anders Palar, 2021, Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 108, hlm. 78

penelitian di atas adalah mampu menjelaskan secara rinci bagaimana peran dari agen pelaksana kebijakan.

Namun kekurangan beberapa penelitian di atas hanya fokus menjelaskan seputar peran dan kedudukan agen pelaksana kebijakan, sedangkan terdapat dua aspek penting dalam implementasi kebijakan yaitu *street level bureaucrat* dan kelompok sasaran (*target group*) di mana kajian tentang *target group* tersebut tidak peneliti temukan dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti temui. Kekurangan penelitian terdahulu menjadi kajian dari penelitian yang akan peneliti kaji saat ini sekaligus menjadi pembaharu dari penelitian sebelumnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sejak diluncurkannya Program Kartu Prakerja sampai saat ini ada 37 gelombang yang telah dilaksanakan. Namun dibalik keberhasilan tersebut jika dilihat dari *sisi target group* kebijakannya terdapat fenomena unik yang sepertinya sudah menjadi rahasia umum. Yaitu kehadiran pihak ketiga yang ikut andil dalam proses implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja. Kehadiran Joki Prakerja memang bukan sebuah tindak kejahatan ataupun semacamnya, meskipun biasanya pengguna jasa Joki dalam berbagai urusan birokrasi tidak disarankan namun pada kali ini keberadaan Joki justru dapat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Joki Prakerja bisa memudahkan orang-orang yang ingin mendaftar namun terkendala gagap teknologi. Setidaknya kontribusi Joki Prakerja menimbulkan minat masyarakat untuk mendaftar.



Pada fenomena yang peneliti temui di lapangan Joki Prakerja menjadi oknum yang diberi upah untuk menyelesaikan semua prosedur pendaftaran dan serangkaian pelatihan. Jika peserta yang didaftarkan lulus, nantinya peserta Prakerja menyerahkan semua urusan sampai selesai kepada Joki Prakerja dengan kesepakatan mahar yang telah ditentukan. Secara tidak langsung hal ini akan menjauhkan esensi tujuan dari diselenggarakannya Program Kartu Prakerja, di mana tujuan utama Program Kartu Prakerja adalah meningkatkan kompetensi kerja dan melatih keterampilan kerja masyarakat

Dibalik fenomena yang peneliti temui selain membahas bagaimana implementasi Program Kartu Prakerja dari sisi implementor kebijakan, fokus pada penelitian ini juga terletak pada kehadiran Joki Prakerja, dan kepada peserta kartu Prakerja yang tidak serius menjalankan Program Kartu Prakerja. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan oknum Joki Prakerja terkait, informan memberikan informasi bahwa mereka mendaftar hanya untuk mendapatkan insentif uang saja dan tidak mementingkan esensi pelatihan kerja yang diberikan.

Dalam hal ini peneliti berasumsi fenomena tersebut terjadi karena, kebijakan Program Kartu Prakerja yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi kerja kurang mendalami kondisi sosial penerima kebijakan, karena jika dilihat dari kondisi sosial masyarakatnya, Nagari Ganggo Hilia merupakan masyarakat yang pada umumnya bermata pencarian pekerja harian dan buruh tani. Sebagian besar tidak menempuh pendidikan yang tinggi sehingga banyak yang gagap teknologi. Sulit menyesuaikan kemampuan teknologinya dengan persepsi lembaga online yang

ditunjuk. Berikut tabel yang menunjukkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Ganggo Hilia

Tabel 1.1  
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Nagari Ganggo Hilia

No	Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah orang
1	Penduduk buta aksara dan huruf latin	10
2	Penduduk usia 3-6 tahun Tk/Paud	203
3	Penduduk cacat fisik dan mental	15
4	Penduduk sedang SD/ sederajat	837
5	Penduduk tamat SD/ sederajat	1255
6	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	10
7	Penduduk sedang SLTP/ sederajat	405
8	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	764
9	Penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	50
10	Penduduk sedang SLTA/ sederajat	349
11	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	1412
12	Penduduk sedang D-1	45
13	Penduduk tamat D-1	35
14	Penduduk sedang D-2	30
15	Penduduk tamat D-2	25
16	Penduduk sedang D-3	60
17	Penduduk tamat D-3	70
18	Penduduk sedang S-1	175
19	Penduduk tamat S-1	204
20	Penduduk sedang S-2	5
21	Penduduk tamat S-2	7

(Sumber: Data sekunder (Diolah peneliti tahun 2022) dari Dokumen Kependudukan Nagari Ganggo Hilia Tahun 2021)

Tabel 2.2  
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Nagari Ganggo Hilia

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	991
2	Buruh tani	500
3	Pemilik usaha tani	20

4	Peternakan perorangan	150
5	Buruh usaha peternakan	60
6	Pengumpul hasil hutan	16
7	Buruh usaha pengolahan hasil hutan	64
8	Pemilik usaha pengolahan hasil hutan	10
9	Penambang galian C perorangan	20
10	Buruh usaha pertambangan	168
11	Pemilik usaha pertambangan	10
12	Tukang batu	30
13	Tukang jahit	10
14	Tukang kue	10
15	Tukang rias	5
16	Pengrajin industri rumah tangga lainnya	30
17	Karyawan perusahaan swasta	100
18	Karyawan perusahaan pemerintah	40
19	Pemilik perusahaan	10
20	Karyawan perdagangan hasil bumi	30
21	Buruh perdagangan hasil bumi	50
22	Pengusaha perdagangan hasil bumi	10

(Sumber: Data sekunder (Diolah peneliti tahun 2022) dari Dokumen Kependudukan Nagari Ganggo Hilia Tahun 2021)

Dari kedua tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan serta kondisi masyarakat Nagari Ganggo Hilia masing tergolong rendah. Sementara selain itu semua prosedur yang dipakai dalam program Kartu Prakerja berbasis teknologi dan internet, sesuai dengan yang dikatakan oleh Moeldoko kepala staf kepresidenan “Penerapan digitalisasi pada Kartu Prakerja model penyelenggaraan birokrasi, pelayanan yang baik dan transparan”. Ujar Moeldoko dalam webinar Customer First: Mindset Baru Layanan Publik dalam Program Kartu Prakerja. dalam webinar juga dihadiri oleh Direktur operasi PMO Kartu Prakerja Hengki M. Sihombing dan ekonom Aviliani. Moeldoko menegaskan digitalisasi harus jadi pola baru bagi birokrasi sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang selalu menekankan birokrasi

berbasis digital dan melayani.<sup>16</sup> sesuai data di atas program berbasis digital tersebut menurut peneliti belum cocok di terapkan pada masyarakat yang kondisi sosial ekonominya masih rendah seperti masyarakat Nagari Ganggo Hilia.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan salah yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Maksudnya adalah masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif lebih mudah menerima program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tradisional. Demikian juga kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dengan bantuan teknologi modern.<sup>17</sup> Namun secanggih apapun teknologi yang ada pada suatu daerah jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi tersebut maka sebuah kebijakan yang mengandalkan teknologi dalam pengimplementasiannya pun tidak akan berhasil.

Permasalahan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja menyebabkan timbulnya pertanyaan apakah letak sebuah program sudah tepat. Target kebijakan Program Kartu Prakerja adalah untuk mereka yang berusia 18 tahun keatas dengan kategori pencari kerja, pekerja yang kena PHK, pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, serta pelaku usaha Mikro yang membutuhkan tambahan modal usaha. Namun karena di Indonesia pada saat

<sup>16</sup> Antaranews.com/berita/1855584/konsep-digitalisasi-kartu-prakerja-jadi-pola-baru-birokrasi (diakses pada tanggal 29 Juli tahun 2022, pukul 15:48 WIB)

<sup>17</sup> AG. Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 98

peluncuran Kartu Prakerja terjadi situasi Pandemi Covid-19 Program Kartu Prakerja di prioritaskan untuk pekerja yang dirumahkan dan masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19.<sup>18</sup>

Merujuk pada target kebijakan di atas target kebijakan adalah pekerja yang terkena PHK dan pelaku usaha mikro yang terkena dampak Covid-19. Dapat dilihat bahwa dari kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Ganggo Hilia bisadikatakan bukan mayoritas kategori keduanya. Sehingga dalam realisasinya tidak ada dampak besar pandemi Covid-19 pada masyarakat Ganggo Hilia yang mayoritas bermata pencaharian petani dan pekerja harian. Jarang sekali ditemukan pekerja yang terkena PHK ataupun pelaku usaha mikro yang terkena dampak Covid-19. Karena salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja pada masyarakat Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu, untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Kartu Prakerja pada masyarakat Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman.

---

<sup>18</sup> Prakerja. go. id (diakses pada tanggal 05 Oktober 2021, pukul 17.30 WIB)

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Akademis

Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran mengenai efektivitas implementasi kebijakan yang terkait dengan kebijakan subsidi pemerintah terutama yang berhubungan dengan program-program bantuan tunai dari pemerintah. Kemudian dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya ilmiah mengenai implementasi kebijakan supaya terwujudnya Good Governance. Serta bisa menjadi referensi penelitian berikutnya yang relevan.

### 1.4.2 Praktis

Sedangkan untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pemerintah dalam menganalisis efektivitas sebuah program atau kebijakan. Sehingga dapat menjadi solusi serta referensi oleh pihak yang berwenang agar dapat melakukan pengolahan yang tepat dalam membuat sebuah kebijakan publik.

